



Prinsip Melakukan Kegiatan Bisnis dengan Lembaga dan Kontraktor Pemerintah

Pernyataan Prinsip:

3M berkomitmen untuk menjalankan bisnis kontrak dan subkontrak pemerintahnya dengan secara ketat mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan semua ketentuan kontrak yang berlaku di tingkat nasional, negara bagian, provinsi dan lokal. Karyawan 3M dan pihak ketiga yang harus mematuhi Prinsip ini harus mematuhi semua undang-undang tersebut. Bisnis dengan instansi pemerintah di seluruh dunia, termasuk bisnis melalui kontraktor dan subkontraktor pemerintah, diatur oleh ketentuan yang rumit yang sering kali lebih ketat daripada ketentuan untuk pelanggan komersial. 3M mungkin diminta untuk mengungkapkan dan meng-sertifikasi informasi rinci tentang perusahaan. Sertifikasi atau klausul dapat mencakup subjek seperti kontribusi politik, lobi, hadiah kepada pejabat pemerintah, negara asal, penetapan harga, spesifikasi teknis unik, masalah sosial ekonomi, masalah keberlanjutan, pertanyaan tentang struktur perusahaan, kepemimpinan, pelanggaran etika dan kepatuhan, tuntutan hukum, proses hukum atau banyak hal lainnya. Membuat pernyataan atau sertifikasi yang tidak akurat dan tidak lengkap untuk badan pemerintah atau kegagalan untuk mematuhi klausul dan persyaratan pemerintah yang telah disepakati dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi 3M dan karyawan 3M, dan dapat memengaruhi kemampuan 3M untuk menjalankan bisnis dengan pelanggan pemerintah di masa depan. Sebelum menandatangani kontrak pemerintah apa pun, atau perjanjian apa pun yang terkait dengan pelanggan pemerintah, karyawan 3M harus memastikan bahwa mereka memahami kewajiban kontrak dan bahwa kewajiban kontrak dapat dipenuhi. Karyawan harus mengikuti kebijakan, standar, prosedur, dan proses kontrak pemerintah yang ditetapkan oleh Departemen Kepatuhan Kontrak Pemerintah 3M dan harus bekerja sama dengan Departemen Kepatuhan Kontrak Pemerintah atau Penasihat Hukum yang ditugaskan di unit bisnis mereka untuk mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan.

Tujuan:

Prinsip ini membantu memastikan bahwa 3M mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, negara bagian, provinsi, dan lokal mengenai kontrak pemerintah. Kegagalan dalam mematuhi undang-undang ini dapat memengaruhi kontrak pemerintah 3M yang ada dan kemampuan untuk mengadakan kontrak dengan pelanggan pemerintah di masa depan.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan dapat diberlakukan terhadap mereka yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga mungkin dicakup dalam Prinsip Pedoman Perilaku.



Panduan Tambahan:

- Pahami dan ikuti Kebijakan, Standar, dan Prosedur Kepatuhan Kontrak Pemerintah yang diposting di Pusat Kebijakan atau situs web Departemen Kepatuhan Kontrak Pemerintah (GCC).
- Berkonsultasilah dengan Kepatuhan Kontrak Pemerintah, seorang profesional kontrak pemerintah yang terlatih atau Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk membantu dalam memahami dan memenuhi persyaratan.
- Ketahui dan patuhi secara penuh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual kepada lembaga pemerintah, kontraktor utama, subkontraktor dan pemasok pemerintah.
- Bersikaplah jujur dan akurat dalam semua transaksi dengan pejabat pemerintah, lembaga pemerintah, kontraktor utama dan subkontraktor pemerintah.
- Pastikan bahwa sertifikasi dan pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kontrak dan subkontrak pemerintah disiapkan oleh personel yang berpengalaman, mutakhir, akurat dan lengkap, serta ditandatangani oleh mereka yang memiliki otoritas tanda tangan yang sesuai.
- Jangan pernah mencari atau mendapatkan informasi rahasia mengenai pembelian atau kontrak pemerintah, termasuk informasi mengenai penawaran lelang atau proposal pesaing atau informasi seleksi sumber lembaga tersebut, sebelum pemberian kontrak.
- Jangan membuat pernyataan palsu atau mengesahkan data palsu untuk pegawai pemerintah, lembaga pemerintah, atau kontraktor atau subkontraktor pemerintah.
- Jangan pernah menawarkan atau memberikan tata krama bisnis untuk pegawai pemerintah atau pegawai kontraktor atau subkontraktor pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan nasional, negara bagian, provinsi, atau lokal.
- Jangan menyimpang dari persyaratan kontrak atau subkontrak pemerintah atau ketentuan kontrak pemerintah apa pun.
- Jangan memberikan produk atau layanan tanpa melakukan tes, inspeksi atau kontrol kualitas lain yang diperlukan.
- Sadarilah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berbeda antar negara, negara bagian, provinsi, kotamadya, dan lembaga pemerintah. Mintalah bantuan dari profesional kontrak pemerintah bila diperlukan untuk membantu memastikan kepatuhan.
- Semua karyawan unit bisnis/anak perusahaan yang terlibat dengan kontrak dan subkontrak pemerintah harus:
 - Diberikan pelatihan dengan baik dan memahami hukum, peraturan, dan syarat dan ketentuan kontrak yang berlaku, dan
 - Familiar dengan kebijakan 3M, standar dan prosedur yang terkait dengan kepatuhan kontrak pemerintah.
- Pahami dan ikuti Prinsip Kepatuhan Ekspor, Impor, dan Perdagangan 3M, terutama karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap undang-undang pengendalian ekspor, impor, penandaan produk, dan pernyataan asal produk, secara langsung atau tidak langsung, untuk pelanggan pemerintah internasional atau federal AS, negara bagian, atau lokal.
- Pahami dan ikuti Prinsip Hadiah, Hiburan, dan Perjalanan 3M terkait hadiah untuk pegawai pemerintah internasional atau federal AS, negara bagian, atau lokal.



- Pahami dan ikuti Prinsip Anti-Suap 3M dalam semua urusan dengan pejabat pemerintah internasional atau federal AS, negara bagian, atau lokal atau individu lainnya.
- Dapatkan izin terlebih dahulu dari Bagian Sumber Daya Manusia untuk membahas kontrak kerja dengan atau menawarkan pekerjaan (baik sebagai karyawan, pekerja kontingen, atau konsultan) kepada pegawai pemerintah yang sudah tidak aktif dan yang masih aktif, sebagaimana diperinci dalam Prinsip Mempekerjakan Mantan Pegawai dan Konsultan Pemerintah dan Yang Masih Aktif 3M.

Hukuman:

Pelanggaran terhadap hukum dan Pedoman Perilaku 3M dapat menyebabkan tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.